

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN PENGAMBILAN
KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) MELALUI
TELEKONFERENSI
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU ITE)**

**Eliza Lana NirmalaSimatupang
0987020**

Abstrak

Teknologi Informasi memegang peranan yang penting, baik di masa kini atau masa yang akan datang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia. Ada banyak hal yang membuat teknologi informasi begitu penting dan hal itu dikarenakan bahwa teknologi informasi memacu pertumbuhan ekonomi dunia. Pada perseroan terbatas dilihat dari Undang-Undang No 40 Tahun 2007 sudah mengakomodasi perkembangan teknologi dengan mengadakan RUPS melalui tata cara telekonferensi, dengan semakin mudahnya komunikasi saat ini berdampak pula bagi perkembangan sosial yang bertujuan agar lebih efektif dan efisien. Agar lebih mudah untuk melakukan keputusan secara cepat dan berdampak positif bagi kelangsungan perusahaan.

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana keabsahan suatu kegiatan RUPS yang dilakukan secara telekonferensi serta keabsahan dari dokumen yang dihasilkan dari RUPS apakah memiliki kekuatan hukum untuk menjadi bukti di dalam proses pembuktian. Sifat penelitian ini yuridis normatif dengan mengumpulkan bahan dari undang-undang, literatur buku, artikel, maupun peraturan lain terkait. Bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan, kemudian diklasifikasikan menurut sumber dan hirarki untuk dikaji secara keseluruhan.

Penggunaan media telekonferensi dalam Rapat Umum Pemegang Saham di Perseroan Terbatas dengan menggunakan dokumen elektronik sebagai sesuatu alat bukti yang sah, haruslah melalui syarat sah nya penggunaan dokumen elektronik yang harus melalui uji syarat minimal yang terdapat dalam UU PT maupun UU ITE terkait dengan syarat keabsahan pelaksanaan RUPS secara konvensional maupun melalui telekonferensi serta syarat tentang tandatangan elektronik dan dokumen elektronik yang terdapat dalam hasil RUPS. Sehingga agar RUPS melalui telekonferensi itu sah harus sudah memenuhi batas minimal pembuktian, oleh karena dalam teori hukum pembuktian disebutkan bahwa agar suatu alat bukti yang diajukan di persidangan sah sebagai alat bukti, harus dipenuhi secara utuh syarat formil dan materiil sesuai dengan yang ditentukan oleh undang-undang.

Kata kunci :Telekonferensi, RUPS, DokumenElektronik.

**Legal Review The Validity Of Decision in General Meeting of The
Shareholder's through a Teleconference Based On Law No. 11 Year 2008
About Information And Electronic Transaction (ITE Statute)**

**Eliza Lana Nirmala Simatupang
0987020**

Abstract

Technology of Information has an important role for now and the future. Technology of Information believed will bring advantage and huge interest for the nations around the world. There are things which make Technology of Information become very important. It happens because Technology of Information can ignite growth of world economically. Based on Statute No. 40 Year 2007, limited company (ltd.) has accomodated development of technology by holding General Shareholder's Meeting using teleconference procedural. The impact of communication become easier is to make social developing more efficient and effective. It also brings determination for the company positively to make decision making method faster than before.

The research aims to discover the validity of General Shareholder's Meeting held using teleconference and also to find out the validity of General Shareholder's Meeting's result, if, in law, it has strength to be legitimate evidences during verification process. The attribute of the research is normative judicial/juridical material collected from Statute, references, articles, and other related regulation. Either primary law or secondary law materials are collected based on the case then classified according to the resources and the hierarchy (theory), so it can be acknowledged entirely.

Teleconference media utilization, during Limited Company's General Shareholder's Meeting using electronic records as ligitimate evidences, should pass legitimation condition of electronic records usage. It should be examined using every condition written on UU PT (PT Statute) or UU ITE (ITE Statute) which concern about legitimation of General Shareholder's Meeting procedural condition conventionally and also using electronic signature and electronic records condition written on the result of General Shareholder's Meeting. It is done so that General Shareholder's Meeting, held by teleconference which should have been proven legitimately, has fulfilled the standard of requirements. It should have been done based on law of evidence theory. The theory said to make the evidences which brought to the council are verified, it should have been completed by material and formal requirements according to the presently statute.

Key Word : Teleconference , General Meeting of The Shareholder's, Electronic Records.

DAFTAR ISI

	Halaman
Pernyataan Keaslian	i
Pengesahan Pembimbing	ii
Persetujuan Panitia Sidang Ujian	iii
Persetujuan Penguji Sidang	iv
Abstrak	v
Abstract	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	x
Daftar Singkatan.....	xiii
Daftar Lampiran	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	10
C. Tujuan penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Kerangka Pemikiran	11
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II REGULASI MENGENAI RUPS MENURUT UU NO. 40	
TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS	
A. Pengertian Perseroan Terbatas	20

1. RUPS dalam UU PT	30
2. Kewenangan RUPS	36
B. Syarat dan Keabsahan RUPS Menurut UU No. 40 Tahun 2007	
1. Syarat RUPS	42
2. Keabsahan RUPS	47
C. Akibat Hukum Dari RUPS	50
BAB III TINJAUAN MENGENAI KEABSAHAN PENGAMBILAN	
KEPUTUSAN RUPS MELALUI TELEKONFERENSI MENURUT UU	
NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI	
ELEKTRONIK	
A. Pengertian Umum Tentang Telekonferensi Menurut UU ITE	53
B. Mekanisme RUPS melalui media Telekonferensi menurut UU	
Perseroan Terbatas	57
1. Kehadiran para pihak	57
2. RUPS melalui media	59
BAB IV NILAI DAN PERTIMBANGAN HUKUM DIIZINKANNYA	
TELEKONFERENSI SEBAGAI SARANA PENGAMBILAN	
KEPUTUSAN RUPS MENURUT UU ITE	
A. Legalitas dan Akibat Hukum Pengambilan Keputusan RUPS	
Melalui Telekonferensi Dikaitkan dengan UU Perseroan Terbatas	
dan UU ITE	78
B. Kekuatan Pembuktian RUPS melalui media Telekonferensi dalam	
Hukum Acara Perdata Indonesia.....	87

1. Pengertian pembuktian dalam hukum acara perdata Indonesia..	87
2. Kekuatan pembuktian hasil RUPS melalui Telekonferensi.....	93

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	106
B. Saran	108

DAFTAR PUSTAKA.....	xiv
---------------------	-----

Curriculum Vitae	xix
------------------------	-----

DAFTAR SINGKATAN

AD /ART	: Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga
CA	: <i>Certification Authority</i>
Hir	: Herziene Inlandsch Reglement (Hukum Acara Perdata bagi daerah-daerah pulau Jawa dan Madura.)
ITE	: Informasi dan Transaksi Elektronik
Jo	: <i>juncto</i> (berhubungan dengan)
Jis	: <i>junctis</i> (berhubungan dengan) bentuk jamak dari <i>jo</i> .
KUHD	: Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
NV	: <i>Naamlooze Vennootschap</i>
PT	: Perseroan Terbatas
PTI	: Pemanfaatan Teknologi Informasi
PKR	: Pernyataan Keputusan Rapat
P3P	: Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Permohonan Pernyataan Pailit
RUPS	: Rapat Umum Pemegang Saham
RUU	: Rancangan Undang-Undang
Rbg	: <i>Rechtsreglement voor de Buitengewesten</i> (Hukum Acara Perdata bagi daerah-daerah luar pulau Jawa dan Madura.)
UU	: Undang-Undang

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
------------	---